# BAB V KESIMPULAN DAN SARAN



## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian “Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Analisis Beban Kerja Dengan Metode WISN di Unit Rekam Medis Rawat Jalan RSUD Grati” dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perhitungan beban kerja menggunakan metode *Workload Indicator Staff Need* (WISN) di Unit Rekam Medis Rawat Jalan di RSUD Grati Kabupaten Pasuruan mengidentifikasi uraian tugas petugas dari setiap unit yang ada yaitu pendaftaran rawat jalan pasien baru dan lama, retrival, distribusi, filing, assembling dan koding. Waktu kerja tersedia di Unit Rekam Medis Rawat Jalan di RSUD Grati Kabupaten Pasuruan adalah 260 hari/tahun, atau 37,5 jam/minggu, atau 1.181,25 jam/tahun. Standar beban kerja sebesar 219.009,2 dengan rata-rata sebesar 31.287,0. Standar kelonggaran bagi petugas sebesar 0,00591 selama satu tahun digunakan untuk kegiatan yang menunjang pelayanan.

Dari hasil perhitungan beban kerja menggunakan metode *Workload Indicator Staff Need* (WISN) di Unit Rekam Medis Rawat Jalan di RSUD Grati Kabupaten Pasuruan menunjukkan hasil perhitungan dibutuhkan sebanyak 13,614 orang dibulatkan menjadi 13 orang petugas. Sedangkan saat ini jumlah petugas rekam medis rawat jalan di RSUD Grati berjumlah 8 orang.

## Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian “Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Analisis Beban Kerja Dengan Metode WISN di Unit Rekam Medis Rawat Jalan RSUD Grati” dapat disarankan sebagai berikut:

* + - * 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kekurangan petugas rekam medis bagian rawat jalan setelah dilakukan perhitungan berdasarkan metode Analisis Beban Kerja WISN Sehingga perlu adanya penyesuaian jumlah petugas agar kegiatan pelayanan rekam medis dapat berjalan dengan maksimal, efektif, dan efisien. Penambahan petugas disarankan merupakan seorang perekam medis sesuai Permenkes No. 55 Tahun 2013 dengan kualifikasi memiliki latar belakang pendidikan minimal DIII RMIK.
        2. Kebijakan mengenai program pendidikan dan pelatihan bagi petugas rekam medis perlu segera ditetapkan karena program tersebut merupakan hak sebagai pegawai yang juga berkenaan dengan meningkatkan standar kompetensi petugas.